ANALISIS JPZIS NU-CARE LAZISNU JAWA TIMUR TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DALAM MASJID

**Moh. Rizki Syafiullah, M. Ghifarri Alamsyah, Moh. Rofiqqih, M.
Rajudin Shobah, Mazro'atus Sa'adah.**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*E-mail: muhammadrizkisyafiullah@gmail.com, mrofiqqih@gmail.com,
ghiffary.arudam@gmail.com, rajudinshobakh@gmail.com,
mazroatus.saadah@uinsa.ac.id*

Abstract

Zakat is a type of philanthropy in the Islamic religion that has a very important role in improving the welfare of the Muslim Ummah and is one of the five pillars of Islam. In terms of zakat management, it is not only the responsibility of the government but there needs to be a role from the community and zakat amil institutions organized by local communities. Especially in terms of Islamic community life, mosques have a very close relationship. Mosques not only function as places of worship but have a very important role in terms of zakat management with models of collecting, distributing, utilizing zakat, and managing human resources for zakat managers. The existence of zakat amil institutions in Indonesia, can help facilitate the process of collecting and distributing zakat in Indonesia.

Key Words: LAZISNU Jawa Timur; Zakat Fitrah; Pendistribusian Zakat.

Abstrak

Zakat adalah salah satu filantropi dalam agama Islam yang mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan Umat Islam dan merupakan salah satu rukun dari lima rukun Islam. Dalam hal pengelolaan zakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun perlu adanya peran dari masyarakat dan lembaga amil zakat yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Khususnya dalam hal kehidupan masyarakat Islami, masjid mempunyai kaitan yang sangat erat. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah semata, tetapi mempunyai peran yang amat penting dalam hal pengelolaan zakat dengan model pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan manajemen sumber daya manusia pengelola zakat. Dengan adanya lembaga-lembaga amil zakat yang ada indonesia dapat

membantu memudahkan proses pengumpulan dan penyaluran zakat yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: LAZISNU Jawa Timur; Zakat Fitrah; Pendistribusian Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT setelah manusia dikarunia keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi orang muslim, pelunasan zakat merupakan salah satu sebagai cermin kualitas imanya kepada Allah SWT. Kewajiban zakat merupakan kewajiban agama seperti halnya shalat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan dan pemanfaatannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan setiap pembelajarannya di akhirat kelak. Dengan demikian setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai nisab dan haul (satu tahun kepemilikan) berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal (Dwi, 2019).

Zakat adalah salah satu filantropi dalam agama Islam yang mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam dan merupakan salah satu rukun dari lima rukun Islam (Subandi, 2015). Berdasarkan pengertian secara bahasa zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan dalam istilah fiqh zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkannya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Fitria, 2016). Zakat diambil dari sebagian harta seorang Muslim yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam ajaran Islam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surat At Taubah ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Organisasi pengelola zakat sebagai sebuah organisasi pengelola dana masyarakat yang diberi kewenangan oleh pemerintah (Fitria, 2016). Organisasi pengelola zakat dapat mengelola dan mendayagunakan zakat untuk masyarakat atau mustahik di daerah yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa organisasi pengelola zakat mengelola zakat, infak dan sedekah yang dalam hal ini seperti LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nadhatul Ulama) tidak hanya sebatas pendistribusian pada kebutuhan konsumtif, tetapi dalam bentuk memberdayakan masyarakat untuk bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu, zakat yang terkumpul dikelola dan digunakan untuk program pendayagunaan yang menghasilkan keuntungan, sehingga zakat mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan agama (Nasional et al., 2019).

Di mana hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan menggunakan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lain, hal ini lebih dikenal dengan sebutan "*centralistic*" atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibanding daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap propinsi. Hampir di setiap negara Islam melalui pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah (Qardhawi, 2005).

Namun bagaimana sistem pelaksanaan pemungutan zakat dan pendistribusiannya yang dilakukan, siapa yang dapat dipercaya untuk memutuskan dan apakah pendistribusiannya sudah tepat sasaran bagi yang berhak menerimanya. Salah satunya adalah bagaimana menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk beribadah ritual, tetapi juga memposisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multifungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi (Wulandari, 2020). Untuk menjawab hal tersebut tentu dibutuhkan pemahaman dan pematapan pengetahuan terhadap amil zakat atau pengurus JPZIS baik

JPZIS yang dibentuk di masjid-masjid dan juga JPZIS yang dibentuk di musholla-musholla yakni melalui pendampingan dan pelatihan. Pengabdian masyarakat ini melaksanakan pelatihan pengelolaan zakat bagi pengurus JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang dijalankan oleh LAZIS NU Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil di NU Care LAZISNU Jawa Timur dikarenakan ketertarikan kami terkait kolaborasi antara LAZISNU dengan para pengurus/Ta'mir masjid dan musholla yang menjadikan JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah). Penelitian ini dilakukan pada saat bulan Ramadhan dan setelah bulan Ramadhan di mana pada saat ini banyak orang menunaikan zakat fitrah dan dilaksanakan sebanyak 1 kali setelah bulan Ramadhan. Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan antara peneliti dengan informan. diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di tempat. Data yang diambil dari amil yang bekerja di NU Care LAZISNU Jawa Timur dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden juga diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan ketika ditempat.

PEMBAHASAN

Konsep Zakat Fitrah dalam Islam

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim sebagai bentuk pembersihan diri dan penyempurna ibadah puasa selama bulan Ramadan. Zakat ini memiliki tujuan untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil dan perilaku buruk yang mungkin terjadi saat menjalani puasa. Selain itu, zakat fitrah juga menjadi wujud kepedulian sosial, agar kaum dhuafa dan fakir miskin dapat merasakan kebahagiaan dan kebutuhan pokok mereka terpenuhi pada hari raya Idulfitri. Kewajiban ini berlaku bagi semua umat Islam yang mampu, termasuk anak-anak, dan biasanya dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma.

Dalam Islam, zakat fitrah memiliki dimensi spiritual dan sosial sekaligus. Secara spiritual, zakat ini mengajarkan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah SWT serta menanamkan sikap rendah hati kepada yang membutuhkan. Secara sosial, zakat fitrah memainkan peran penting dalam distribusi kekayaan dan menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat. Dengan adanya zakat fitrah, diharapkan tidak ada orang yang kelaparan atau merasa terabaikan di hari kemenangan, sehingga Idulfitri dapat dirayakan dalam suasana kegembiraan dan persaudaraan bagi seluruh umat Islam.

Fungsi Sosial Zakat Fitrah bagi Masyarakat

Zakat fitrah memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial di masyarakat. Dengan mendistribusikan zakat kepada fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, zakat fitrah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dan miskin. Bantuan berupa bahan pokok seperti beras atau makanan lain ini memastikan bahwa semua orang, terutama kaum dhuafa, dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka saat merayakan Idulfitri. Selain itu, zakat fitrah menumbuhkan rasa empati dan kepedulian, sehingga masyarakat yang lebih mampu dapat berperan aktif dalam mengurangi penderitaan sesama.

Selain aspek ekonomi, zakat fitrah juga memperkuat ikatan sosial dalam komunitas. Melalui tradisi saling memberi dan berbagi, masyarakat diingatkan akan pentingnya solidaritas dan gotong royong, menciptakan hubungan harmonis antarindividu dan kelompok. Dengan terlaksananya zakat fitrah, perasaan keterasingan dan keterbatasan yang mungkin dirasakan kaum miskin dapat berkurang, sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan kebersamaan dan kegembiraan di hari raya. Secara kolektif, zakat fitrah berperan dalam mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Fungsi dan peran NU-Care Lazisnu dalam pengelolaan zakat

Asal muasal JPZIS dapat ditarik kembali ke upaya NU Care LAZISNU dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Dakwah juga merupakan sebuah proses agen perubahan untuk menjadi lebih baik lagi dalam hal aqidah, ibadah dan mu'amalahnya sehingga manusia bisa kembali dalam keadaannya yang fitrah sesuai dengan syariat Islam. Sekarang ini orientasi dakwah hendaknya diarahkan kepada dakwah tablig menuju dakwah riset dan aksi, dakwah teks-normatif kepada dakwah sosial kemasyarakatan, dakwah individual dan komunal menuju dakwah organisasional dan struktural, strategi dakwah yang monoton menuju strategi dakwah yang dinamis dan multialog, serta berkonsentrasi pada social welfare (Basit, 2013). Dalam rangka memperluas dampak positif dari dana tersebut, NU Care LAZISNU mulai mencari cara untuk mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan hasil zakat secara lebih efisien, tepat sasaran, dan transparan kepada yang membutuhkan. JPZIS memiliki tugas untuk menerima, mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan harta zakat, termasuk zakat fitrah dan JPZIS berbasis Masjid atau Musholla yang stuktur kepengurusannya di-SK-kan oleh LAZISNU atau lebih dikenal dengan NU Care LAZISNU pada jenjang yang lebih tinggi.

Ketentuan Umum Undang Undang Tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan (bahwa yang disebut, dimaksud dan dikehendaki) dengan Amil Zakat adalah Badan dan atau Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dalam hal ini LAZ (Lembaga Amil Zakat), seperti NU Care LAZISNU. Pengertian dari pernyataan hukum dapat dijabarkan :

1. BAZNAS, sebagai Badan Amil Zakat Nasional milik Pemerintah, dibentuk oleh Pemerintah, diberi kewenangan untuk membentuk Unit Pengelola Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ sebagai satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat, hingga di level masyarakat desa.
2. NU Care LAZISNU, sebagai Badan / Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum dan perundang-undangan, diberi kewenangan untuk membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang diberi nama

JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat Infak Shadaqah), juga hingga level masyarakat di pedesaan (Abdullah Arief Cholil, 2015).

Kemudian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Bagian Keempat tentang Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat Pasal 66 menyatakan ;

1. Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai amil zakat.
2. Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 78, dinyatakan :

1. Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
2. Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila: (a) tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat. atau (b) tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa :

1. Panitia Zakat yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat dijamin oleh Undang Undang dengan ketentuan yang sangat ketat baik secara hukum perundang-undangan di Indonesia maupun secara Syariat Islam.
2. Panitia Zakat yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat sangat direkomendasikan untuk diangkat, disahkan dan ditetapkan oleh

Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum dan perundang-undangan seperti BAZNAS dan NU CARE LAZISNU.

3. Selagi Panitia Zakat yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat yang tidak ditetapkan oleh pihak berwenang secara hukum dan undang-undang, kedudukannya bukan sebagai (lembaga) Amil Zakat dan tidak memiliki kewenangan untuk mengelola Zakat, termasuk Zakat Fitrah, demikian juga tidak diperkenankan untuk menamakan diri sebagai Amil.
4. Konsekuensi dari point 3 di atas, Panitia Zakat yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat tidak diperbolehkan secara syar'i untuk mengambil harta zakat (fitrah) untuk keperluan operasional apapun — termasuk dengan dalih 'Amil- dalam pengelolaan zakat (fitrah).

Konsep jaringan JPZIS dan praktiknya di lapangan

Sebagai Lembaga Amil Zakat yang sah secara hukum dan perundang-undangan NU CARE LAZISNU memiliki komitmen untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam Lembaga Amil Zakat yang sah dalam organisasi JPZIS, Jaringan Pengelola Zakat Infak Shadaqah LAZISNU. Lalu Bagaimana cara, prosedur pengangkatan JPZIS (Amil Zakat) oleh NU Care LAZISNU, apa saja syarat syaratnya yang harus dipenuhi, bisakah JPZIS di Masjid dan Musholla mendapatkan SK (Surat Keputusan) Pengesahan dan Pengangkatan oleh NU Care LAZISNU?.

Merujuk Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur di PP Tremas Pacitan pada 09-10 November 2014, Amil Zakat dalam konteks syar'i adalah orang yang ditunjuk Imam (penguasa tertinggi negara) sebagai penarik, pengumpul dan pendistribusi zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini seiring penjelasan al-Qadhi Abdul Haq bin Ghalib al-Andalusi al-Maliki (481-543 H/1088-1147 M) dalam tafsirnya, al-Muharrar al-Wajiz:

وَأَمَّا الْعَامِلُ فَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يُسْتَنْبَهُ الْإِمَامُ فِي السَّعْيِ فِي جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَكُلِّ مَنْ يَصْرَفُ مِنْ عَوْنٍ لَا يُسْتَعْنَى عَنْهُ فَهُوَ مِنَ الْعَامِلِينَ.

Artinya: "Amil adalah orang ditugaskan oleh Imam untuk menggantikannya dalam menarik zakat, dan setiap orang yang

berkerja membantu ‘amil yang pasti dibutuhkannya, maka ia termasuk golongan amil”.

Demikian pula Ibn Qasim al-Ghazi (859-918 H/ 1455-1512 M) dalam karya legendarisnya, Fath al-Qarib, ia menjelaskan:

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتُعْمِلَهُ الْإِمَامُ عَلَى اخْتِذِ الصَّدَقَاتِ وَتَقْفُهَا لِلسُّتَحِقِّينَ

Artinya: “Amil adalah orang yang ditugasi Imam untuk memungut zakat dan menyerahkan kepada mustahiqnya.”

Pengangkatan amil zakat sebenarnya merupakan kewenangan Imam (penguasa tertinggi) seperti dalam definisi di atas. Namun demikian, kewenangan itu dapat dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, badan maupun lembaga sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Jumhur ulama, yaitu Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat tentang pengertian amil. Menurut jumhur ulama amil adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat. Seperti orang yang memungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk dan keluar, berapa sisa. Serta, pemelihara harta zakat, serta membagikannya kepada mustahiq (Kalimah, 2020).

Al-Qur’an menyatakan amil sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Demikian disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat.

Amil zakat menurut istilah, yaitu secara bahasa, istilah amil berasal dari kata ‘*amila ya’malu*’ yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan amil zakat menurut bahasa; kata amil (عامل) adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu. Kita akan baca pengertian amil zakat dari para ulama sebagai berikut: Imam Syafi’i (w. 204 H) pernah menyebutkan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْعَامِلُونَ عَلَيْهَا مِنْ وَالِهِ الْوَالِي قَبْضَهَا

Imam Syafi’i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/penguasa untuk mengumpulkan zakat.

JPZIS NU di sini berperan sebagai salah satu OPZ yang dikelola oleh pihak swasta. Organisasi tersebut, yang merupakan ormas Nahdlatul Ulama, telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 tahun 2016, ormas tersebut telah mendapatkan izin sebagai lembaga amil zakat skala kabupaten. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menetapkan bahwa pengelolaan ZIS meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, infak, dan shodaqoh (Sugita, A, 2020).

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai negara dengan populasi Islam terbesar juga pastinya memiliki potensi zakat yang besar, oleh karena itu dibutuhkan bantuan oleh seluruh elemen masyarakat dan pengetahuan yang pastinya semua harus faham dan mengerti mengenai wajibnya zakat yang di mana termasuk rukun Islam keempat. Dengan adanya lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan NU Care LAZISNU (Lembaga Amil, Zakat dan Shadaqah Nadhatul Ulama) dapat membantu mengeksplorasi zakat, infaq dan shadaqah dengan efisien dan terorganisir.

Menjelang bulan suci Ramadhan banyak umat muslim yang hendak menunaikan ibadah zakat fitrah, di mana itu sangat membutuhkan energi yang lebih, agar zakat fitrah ini dapat tertunaikan dan tersalurkan dengan baik. Lalu NU Care LAZISNU membuat JPZIS (Jaringan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang tujuannya membantu masyarakat agar lebih mudah menunaikan zakat fitrah mereka dengan cara mengajak ta'mir masjid untuk mengajukan diri mereka agar menjadi amil yang dipercaya negara untuk mengembangkan zakat ini. Namun terdapat persyaratan yang ketat dan pelatihan agar mereka yang mengajukan dapat Surat Keputusan (SK) resmi menjadi amil yang disahkan oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

Dengan ini berharap agar zakat yang terkumpul dikelola dan digunakan untuk program pendayagunaan yang menghasilkan keuntungan, sehingga zakat mampu memberikan manfaat kepada

masyarakat dalam sektor ekonomi, pendidikan, sosial, dan agama(November, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Arief Cholil. (2015). Studi Islam II. In *Studi Islam II*.

Basit, A. (2013). *Filsafat Dakwah*.

Dwi, I. (2019). Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Inte. *Economic Education Analysis Journal*, 2(1), 18–23.

Fitria. (2016). Pengelolaan Zakat Pada Masjid Di Kota Palembang. *Intelektualita*, 5(2), 1–9.

Kalimah, S. (2020). *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*. 1(1).

Nasional, P. S., Papers, C. F., & Prastiwi, I. E. (2019). *PERAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN*. *September*, 119–138.

November, N. (2022). *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah*. 1(3), 768–774.

Qardhawi, Y. (2005). *Spectrum Zakat Dalam Membangun Kerakyatan*.

Subandi. (2015). Manajemen+Zakat,+Infaq+Dan+Shadakah+(Zis). *Ziswaf*, 1(1), 2527–4430.

Sugita, A, et al. (2020). Analisis-Peranan-Pengelolaan-Dana-Ziswaf-9B7F06C2. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1, 1–11.

Wulandari, S. A. (2020). *PENINGKATAN MUZAKKI (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember) Oleh : FAKULTAS DAKWAH (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember) Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S . Sos) Fakultas Dakwah Prodi Manajemen Dakwah Oleh NIM : D20164008 Disetujui Pembimbing*.